



# PROSIDING

## Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke - 4

### PENATAAN REGULASI DI INDONESIA

APHTN-HAN | PUSKAPSI FH UNEJ | PUSaKO FH UNAND

Penyunting :

Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.

Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.

Dairani, S.H., M.H.

Rosita Indrayati, S.H., M.H.

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

ISBN : 978-602-5617-07-2

# **PROSIDING**

**KONFERENSI NASIONAL HUKUM TATA NEGARA (KNHTN) KE - 4  
“PENATAAN REGULASI DI INDONESIA”**

**AULA PB. SUDIRMAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
Jember, 10-13 November 2017**

**UPT PENERBITAN  
UNIVERSITAS JEMBER**

**KONFERENSI NASIONAL HUKUM TATA NEGARA (KNHTN) KE - 4**  
**“PENATAAN REGULASI DI INDONESIA”**  
**Jember, 10-13 November 2017**

**Susunan Panitia :**

Totok Sudaryanto, S.H., M.S.  
Warah Atika, S.H., M.Hum.  
Nurul Laili Fadhila, S.H., M.H.  
Halif, S.H., M.H.

**Reviewer :**

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.  
Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.  
Dr. Jayus, S.H., M.Hum

**Editor :**

Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.  
Eddy Mulyono, S.H., M.H.  
Dairani, S.H., M.H.  
Rosita Indrayati, S.H., M.H.  
Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

**Diterbitkan Oleh :**

UPT Penerbitan Universitas Jember  
Jl. Kalimantan 37, Jember 68121  
Telp. 0331-330224, VOIP. 0319  
e-mail :upt-penerbitan@unej.ac.id

**ISBN: 978-602-5617-07-2**

Hak Cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak tanpa ijin tertulis dari penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, *Photoprint* maupun *microfilm*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, atas segala Karunia Rahmat dan Nikmat yang diberikan sehingga kami mampu melaksanakan acara rutin tahunan yaitu Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-4, dengan Tema “Penataan Regulasi Di Indonesia” yang dilaksanakan di Jember Jawa Timur, pada tanggal 10-13 November 2017. Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama Antara Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Indonesia, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember.

Peserta Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ini kurang lebih 600 Peserta dari 150 Perguruan Tinggi di Indonesia yang terdiri dari peserta *Call For Paper* dan *Non Call For Paper*. Hadir pula dalam kegiatan ini perwakilan dari beberapa lembaga negara dan lembaga pemerintahan seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Jember.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam konferensi ini adalah mendengarkan orasi ilmiah Menteri Hukum dan HAM Dr. Yasonna H. Laoly, selanjutnya Konferensi yang dibagi 2 (dua) sesi dengan topik pertama strategi perampangan dan harmonisasi regulasi pusat dan daerah, dan topik kedua perbandingan penataan regulasi di berbagai negara dengan menghadirkan *Keynote Speaker* Kepala Staf Kepresidenan RI Teten Masduki. Adapun narasumber saat Konferensi adalah Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, Gubernur Jawa Timur Dr. Soekarwo, Prof. Yuzurua Shimada dari Nagoya University, Prof. Simon Butt dari Sidney University, Dr. Daniel Heillman dari Hans Seidel Stiftung Jerman dan Dr. Harjono Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Setelah Sesi Konferensi Selanjutnya juga diselenggarakan *Parralel Group Discussion* (PGD) dengan 3 tema yaitu perampangan dan harmonisasi regulasi pusat dan daerah, penataan ulang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, serta pengujian peraturan perundang-undangan satu atap. Untuk tiap-tiap PGD juga diisi oleh narasumber sebagai pemantik diskusi dalam hal ini diantaranya ada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur

Hamzah, Dr. Zainal Arifin Mochtar dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Dr. Susi Dwi Harjanti dari Universitas Padjajaran, Ode Madril, SH, L.LM dari Universitas Gadjah Mada dan Feri Amsari, SH, L.LM. Pusako.

Konferensi ini telah menghasilkan rekomendasi yang disebut dengan *Jember Recommendation* (Rekomendasi Jember). Rekomendasi jember berisikan Strategi Perampingan dan harmonisasi Regulasi di Pusat dan Daerah; Penataan ulang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan; dan pengujian peraturan perundang-undangan satu atap di Mahkamah Konstitusi. Hasil rekomendasi konferensi ini didorong agar dapat dipergunakan oleh Presiden RI dan pihak terkait dalam melakukan penataan regulasi di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada lembaga yang telah mendukung pelaksanaan Konferensi ini yaitu:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),
2. Mahkamah Konstitusi (MK),
3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
4. Pemerintah Provinsi Jawa Timur; dan
5. Pemerintah Kabupaten Jember.

Semoga kerjasama yang baik ini dapat terus berlanjut di masa-masa akan datang.

Jember, 1 Desember 2017

Panitia KNHTN Ke-4

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>HALAMAN ISBN</b>	ii
<b>SUSUNAN PANITIA</b>	ii
<b>SUSUNAN TIM REVIEWER</b>	ii
<b>SAMBUTAN PANITIA</b>	iii
<b>DAFTAR ISI</b>	v
<b>HALAMAN REKOMENDASI KN HTN 4</b>	xii

### TEMA I

#### STRATEGI PERAMPINGAN DAN HARMONISASI REGULASI PUSAT DAN DAERAH

1	<b><i>Simplikasi Peraturan Daerah Sejenis Dalam Upaya Merampingkan Regulasi</i></b>	1
	Ahmad Fikri Hadin & Muhammad Erfa Redhani	
2	<b><i>Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Investasi dalam Menjawab Tantangan Demokrasi Ekonomi Pancasila</i></b>	20
	Muhammad Ikhsan Alia Andre Aulia Rahman	
3	<b><i>Menata Praktik Pembentukan Peraturan Daerah Di Era Otonomi Daerah Dalam Rangka Penguatan Regulasi Pusat Dan Daerah</i></b>	42
	Bachtiar	
4	<b><i>Penataan Regulasi Paket Undang-Undang Keuangan Negara Dalam Rangka Mewujudkan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Konstitusional</i></b>	64
	Beni Kurnia Illahi	
5	<b><i>Penataan Regulasi Melalui Penataan Syarat Pejabat Dengan Kewenangan Membentuk Peraturan Perundang-Undangan</i></b>	93
	Budiman N.P.D Sinaga	
6	<b><i>Harmonisasi Peraturan Daerah: Tantangan Dan Strategi Di Era Otonomi Daerah</i></b>	102
	Dani Muhtada & Ayon Diniyanto	
7	<b><i>Peraturan Desa, Penataan Kewenangan Dan Mekanisme Hukum Pembatalannya Dalam Format Otonomi Desa Di Indonesia</i></b>	117
	Eddy Asnawi & Yasrif Yakub Tambusai	

8	<b><i>Sinkronisasi Dan Harmonisasi Pembentukan Regulasi Pusat Dengan Daerah Dalam Rangka Penataan Regulasi Sebagai Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia</i></b>	135
	Erik Sepria	
9	<b><i>Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Deregulasi Pemerintah</i></b>	159
	Erna Ratnaningsih	
10	<b><i>Penataan Perda Bermasalah Pasca Putusan MK, MA Harus Bagaimana</i></b>	177
	Fajar Laksono Suroso	
11	<b><i>Harmonisasi Perbedaan Paradigma Antara Rezim Hukum Upa Dengan Rezim Hukum Uu Perbendaharaan Negara Dalam Mengatur Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah Pemerintah</i></b>	194
	Hengki Andora	
12	<b><i>Menemukan Formulasi Diet Regulasi</i></b>	206
	Ibnu Sina Chandranegara	
13	<b><i>Mengharmoniskan Undang-Undang Melalui Omnibus Law Model Indonesia</i></b>	237
	Jimmy Z. Usfunan	
14	<b><i>Konstitusionalitas Pembatalan Peraturan Daerah Dan Urgensi Revisi Pengaturan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan</i></b>	266
	Luthfi Widagdo Eddyono	
15	<b><i>Penguatan Prolegas Sebagai Dasar Politik Pembentukan Perundang-Undangan</i></b>	283
	Mei Susanto	
16	<b><i>Menakar Konsep Omnibus Law Dan Consolidation Law Untuk Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia: Pendekatan Perbandingan Hukum Tata Negara</i></b>	303
	Mirza Satria Buana	
17	<b><i>Harmonisasi Dan Sinkronisasi Regulasi Agraria (Kajian Over Regulasi Di Bidang Agraria)</i></b>	322
	Rofi Wahanisa	
18	<b><i>Peluang Dan Tantangan Penataan Regulasi Bidang Pemerintahan Daerah</i></b>	342
	Rozi Beni	
19	<b><i>Dinamika Regulasi Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi</i></b>	364
	Taufiqurrohman Syahuri	

20	<b><i>Politik Hukum Penataan Regulasi Di Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Dalam Kerangka Harmonisasi Hukum</i></b>	371
	Wahyu Nugroho	
21	<b><i>Pengharmonisasian Peraturan Daerah</i></b>	399
	Yeni Nel Ikhwan	
22	<b><i>Perihal Menata Regulasi</i></b>	415
	Zainal Arifin Muchtar	
23	<b><i>Benturan Regulasi Dan Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi</i></b>	422
	Veri Junaidi & Adam Mulya Bungamayang	
24	<b><i>Strategy And Regulatory Reform Practices In Japan: Harmonization Of Central And Local Regulations In The Era Of Local Autonomy</i></b>	443
	Yuzuru Shimada	
25	<b><i>Penataan Regulasi, Teori Dan Kritiknya</i></b>	456
	Herlambang P. Wiratraman	
 <b>TEMA II</b>		
<b>PENATAAN ULANG JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA</b>		
26	<b><i>Politik Hukum Pengaturan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia</i></b>	470
	Aan Eko Widiarto	
27	<b><i>Implikasi Otonomi Khusus Papua Terhadap Efektifitas Pembentukan Regulasi Daerah Berbasis Orang Asli Papua</i></b>	493
	Ariyanto, Derita Prapti Rahayu & Yenny Febrianty	
28	<b><i>Sengkarut Produk Hukum Ratifikasi Perjanjian Internasional: Paradigma Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia</i></b>	511
	Ari Wiryadinata	
29	<b><i>Strategi Legislasi Sebagai Upaya Simplifikasi Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia</i></b>	530
	Darwance	
30	<b><i>Kedudukan Dan Status Hukum Ketetapan MPRS Dan MPR Dalam Sistem Hukum Indonesia</i></b>	550
	Faizal Akbar Nasution	



31	<b><i>Penataan Ulang Terhadap Jenis Peraturan Yang Mendapatkan Pelimpahan Dari Undang-Undang (Peraturan Delegasi Dari Undang- Undang) Dalam Sistem Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dan Kedudukan Jenis Peraturan Tersebut Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan</i></b> Fitriani Ahlan Sjarif	567
32	<b><i>Judicial Review Ketetapan MPR/S Di Mahkamah Konstitusi</i></b> Hayatun Na'imah	594
33	<b><i>Kewenangan Pengujian Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Terhadap UUD NRI Tahun 1945</i></b> I Gusti Bagus Suryawan & Indah Permatasari	615
34	<b><i>Penataan Peraturan Pelaksana Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Puu-Xiii/2011)</i></b> Satya Arinanto dan Ike Farida	631
35	<b><i>Urgensi Perampingan Dan Penataan Regulasi Sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Pelayanan Publik</i></b> Imam Ropii	650
36	<b><i>Penataan Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan Menurut UUD NRI 1945</i></b> Khairul Fahmi	665
37	<b><i>Beberapa Pemikiran Dasar Dalam Mendesain Kebijakan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)</i></b> Lukman Hakim	687
38	<b><i>Penataan Ulang Jenis Dan Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia</i></b> Muin Fahmal	701
39	<b><i>Restrukturisasi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia</i></b> Proborini Hastuti	725
40	<b><i>Rekonstruksi Hierarki, Dan Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Perspektif Peraturan Darurat</i></b> Perdana Ahmad Saifulloh	738
41	<b><i>Revitalisasi Pengaturan Perppu Dalam Bingkai Penataan Regulasi Di Indonesia</i></b> Reza Fikri Febriansyah	765

42	<b><i>Pengaruh Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan</i></b>	784
	Ricca Anggraeni & Muhammad Ihsan Maulana	
43	<b><i>Merawat Keadilan Sosial Bagi Masyarakat Hukum Adat: Urgensi Penataan Regulasi Melalui Pembentukan Undang-Undang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat</i></b>	806
	Sulaiman	
44	<b><i>Peraturan Mahkamah Agung Dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</i></b>	825
	Vica Jillyan Edsti Saija	
45	<b><i>Surat Edaran (SE) "Duri" Dalam Tata Perundang-Undangan Indonesia</i></b>	845
	Wendra Yunaldi	
46	<b><i>Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dengan Pendekatan Asas 3E (tinjauan asas-asas dalam undang-undang No. 12 Tahun 2011)</i></b>	855
	Lita Tyesta ALW	
47	<b><i>Rekonstruksi Hierarki Norma Dalam Penataan Regulasi Di Indonesia</i></b>	867
	M. Guntur Hamzah	
48	<b><i>Problematisasi Hirarkhi Peraturan Peundang-Undangan Indonesia (Studi Pasal 8 Ayat (1) Uu 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)</i></b>	880
	Yahya Ahmad Zein	
49	<b><i>Perkembangan Jenis, Hierarki Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusi</i></b>	897
	Bayu Dwi Anggono	

### **TEMA III**

#### **PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SATU ATAP DI MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

50	<b><i>Idealitas Satu Pintu Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi</i></b>	911
	Abdul Wahid	
51	<b><i>Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi RI: Menuju Purifikasi Sistem Peradilan Bifurkasi</i></b>	927
	Agus Riewanto	

52	<b><i>Persoalan Judicial Review Dalam “Dua Atap”</i></b>	948
	Bisariyadi	
53	<b><i>Kompatibilitas Karakteristik Pengujian Peraturan Pada Mahkamah Agung Dalam Pengujian Produk Hukum Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu-Xiii/2015 Dan 56/Puu-Xiv/2016</i></b>	968
	Dian Agung Wicaksono & Luthfi Dwi Hartono	
54	<b><i>Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap Di Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Penataan Regulasi</i></b>	984
	Dody Nur Andriyan	
55	<b><i>Judicial Review Dalam Perspektif Supremasi Konstitusi</i></b>	1005
	Dri Utari Christina Rachmawati	
56	<b><i>Urgensi Integrasi Judicial Review Kepada Mahkamah Konstitusi</i></b>	1027
	Iza Rumesten RS	
57	<b><i>Penyatuan Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi: Evaluasi Dan Format Pelaksanaan Judicial Review Kedepan</i></b>	1041
	M Nurul Fajri	
58	<b><i>Constitutional Preview Sebagai Upaya Menciptakan Perundangan Yang Efisien Dan Berkeadilan</i></b>	1060
	Manunggal K. Wardaya	
59	<b><i>Pengujian Satu Atap: Perluasan Kewenangan Mk Dalam Judicial Review Dapat Mencegah Korupsi Legislasi</i></b>	1069
	Mariyadi	
60	<b><i>Penyatutan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi,(Tinjauan Sejarah Dan Praktek)</i></b>	1086
	Rahayu	
61	<b><i>Integrasi Uji Materi Di Mahkamah Konstitusi Dapat Mencegah Penyalahgunaan Wewenang</i></b>	1102
	Siti Marwiyah	
62	<b><i>Judicial Review Regulasi Oleh Mahkamah Konstitusi</i></b>	1116
	Sulardi	
63	<b><i>Rekonstruksi Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Basis Penjaga Konstitusi</i></b>	1129
	Vieta Imelda Cornelis	
64	<b><i>Efektifitas Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Bingkai Satu Atap</i></b>	1141
	Wenny Purnama Yantje	

65	<b><i>Redesain Pengujian Perundang-Undangan Di Indonesia</i></b>	1156
	Zulkifli Aspan	
66	<b><i>Kebutuhan Menyatukan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi</i></b>	1171
	Fadli Ramadhanil	

**HALAMAN REKOMENDASI**  
**REKOMENDASI JEMBER (*JEMBER RECOMMENDATIONS*)**  
**TENTANG**  
**PENATAAN REGULASI DI INDONESIA**  
**JEMBER, 12 NOVEMBER 2017**

Terkait dengan penataan regulasi di Indonesia, melalui Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) Ke-4 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, dan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas di Jember tanggal 10-13 November 2017, maka untuk meningkatkan kepastian hukum dan kedayagunaan regulasi di Indonesia perlu dilaksanakan pembenahan dalam 3 (tiga) aspek penting:

1. Perampangan dan harmonisasi regulasi Pusat dan Daerah
2. Penataan ulang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia
3. Pengujian peraturan perundang-undangan satu atap di Mahkamah Konstitusi

Dalam kaitan dengan pembenahan Ketiga aspek penting tersebut, maka KNHTN ke-4 yang dihadiri oleh akademisi dari ratusan perguruan tinggi se-Indonesia, peneliti, organisasi masyarakat sipil merekomendasikan langkah-langkah perbaikan yang disebut dengan Rekomendasi Jember, sebagai berikut:

**Strategi perampangan dan harmonisasi regulasi Pusat dan Daerah**

Untuk mencegah pembentukan regulasi yang tidak terkendali oleh badan atau pejabat negara, serta menyelesaikan permasalahan regulasi yang tidak harmonis, tidak sinkron dan saling tumpang tindih yang dapat menghambat upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

maka perlu dilakukan sejumlah langkah-langkah perbaikan oleh Pemerintah sebagai berikut:

**Pertama:** Untuk memangkas sejumlah regulasi yang keberadaannya tidak dibutuhkan dan regulasi yang bermasalah dari segi kepastian hukum, utamanya regulasi dibawah Undang-Undang (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri), maka mendesak bagi Presiden untuk membentuk tim khusus beranggotakan unsur pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil yang bersifat *ad hoc* dengan mandat dan jangka waktu tertentu. Tim ini diperlukan mengingat sulit mengharapakan Kementerian/Lembaga untuk memangkas sendiri regulasi yang dibentuknya mengingat masih tingginya ego sektoral kementerian. Tugas Tim khusus yang juga jamak dibentuk di berbagai negara lain dalam rangka memangkas regulasi ini nantinya adalah:

- a. melakukan evaluasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat ( Peraturan di bawah UU) dan peraturan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah. Hasil evaluasi ini nantinya akan diserahkan kepada Presiden untuk diambil tindakan berupa pemangkasan terhadap regulasi yang bermasalah.
- b. merumuskan kebijakan reformasi pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka membentuk politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan mempertimbangan *best practices* dari negara-negara lain sesuai dengan kebutuhan, antara lain:
  - (i) jenis peraturan;
  - (ii) materi muatan;
  - (iii) kewenangan;
  - (iv) sistem pembentukan; dan

(v) sistem evaluasi.

**Kedua**, untuk mencegah regulasi bermasalah di tingkat daerah dan mengingat kewenangan pembatalan Perda oleh Pemerintah telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka upaya *executive preview* yaitu pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah oleh Pemerintah perlu diperkuat. Selain itu keberadaan instansi vertikal di daerah yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di daerah perlu difungsikan secara optimal untuk mendampingi pemerintah daerah dalam membentuk Peraturan Daerah.

**Ketiga**, Penguatan kelembagaan lembaga yang bewenang membentuk peraturan perundang-undangan perlu dilakukan meliputi: Kejelasan regulasi yang dapat dibentuk, penguatan perancang peraturan perundang-undangan dan hubungannya dengan lembaga lain dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (harmonisasi dan pengundangan)

### **Penataan ulang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia**

Dalam rangka penataan ulang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia merekomendasikan :

- a. Pengaturan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dimuat di dalam UUD 1945, bukan dalam undang-undang;
- b. Ketetapan MPR diakui sebagai jenis peraturan perundang-undangan, tetapi tidak dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan;
- c. Secara hierarkis, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tetap sejajar dengan undang-undang. Namun materi muatan Perppu harus diatur tegas dan dibedakan dari undang-undang;
- d. Undang-undang harus memuat pengaturan masalah yang dimuat di dalamnya secara lengkap, sehingga tidak terlalu banyak delegasi pengaturan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah;
- e. Peraturan menteri tidak dimasukkan kedalam hierarki peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan jenis peraturan perundang-

- undangan. Materi yang dimuat dalam peraturan menteri semestinya dimuat dalam peraturan pemerintah atau peraturan presiden;
- f. Peraturan yang dibuat oleh Lembaga Negara yang pembentukannya diatur dalam UUD 1945 maupun undang-undang, secara hierarki sejajar dengan peraturan presiden;
  - g. Materi muatan peraturan daerah khusus mengenai ketentuan pidana perlu dikaji lebih jauh;
  - h. Adapun hierarki peraturan perundang-undangan yang direkomendasikan:
    - (i) UUD
    - (ii) UU/Perpu
    - (iii) Peraturan Pemerintah
    - (iv) Peraturan Presiden/Peraturan Lembaga-lembaga Negara yang dibentuk sesuai UUD dan UU
    - (v) Peraturan Daerah Provinsi atau nama lain
    - (vi) Peraturan Daerah Kabupaten/kota atau nama lain
    - (vii) Peraturan Desa atau nama lain

### **Pengujian Peraturan Perundang-undangan Satu Atap di Mahkamah Konstitusi**

1. Pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*) seharusnya merujuk pada teori *hierarki* norma dan menguatkan konsistensi norma, sehingga diperlukan satu lembaga yang menjaga konsistensi norma.
2. Apabila peraturan perundangan-undangan yang di atas diuji, maka harus mengikat peraturan yang ada di bawahnya.

Adapun terkait praktik pengujian peraturan perundang-undangan yang terpisah di Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang) dan Mahkamah Agung (Peraturan perundang-undangan dibawah UU) seperti saat ini, maka berdasarkan beberapa pertimbangan sebaiknya disatukan di Mahkamah Konstitusi. Adapun argumentasi agar pengujian peraturan perundang-undangan dilaksanakan dalam format satu atap di Mahkamah Konstusi adalah sebagai berikut:



1. Pengujian peraturan perundang-undangan dua atap tentu menyulitkan para pencari keadilan (*justice seeker*) dalam perspektif *human rights based constitutionalism*.
2. Kebijakan hukum harus mempertimbangkan aspek ekonomi (efisiensi dan manfaat), sehingga proses Pengujian peraturan perundang-undangan mencerminkan asas cepat, sederhana dan biaya murah
3. Pengujian peraturan perundang-undangan satu atap mempertegas peran Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution*.

Adapun metode untuk mendorong perubahan menuju penyelenggaraan *judicial review* satu atap di Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Perubahan konstitusi secara formal (*formal constitutional change*), melalui amandemen konstitusi Pasal 24A dan 24C UUD NRI 1945. Amandemen tersebut didorong secara bertahap, misalnya tahap paling awal adalah terkait dengan cabang kekuasaan kehakiman.
2. Perubahan konstitusi secara informal (*Informal constitutional change*), melalui sejumlah proses perubahan konstitusi yang mengembangkan gagasan dan argumentasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip penyatuatapan proses *judicial review*.
3. Sebagai “Solusi antara”, dengan merujuk pada doktrin penyatuatapan *judicial review* yang menguatkan dan mengefektifkan kekuasaan kehakiman, perlu diperkuat melalui pengembangan forum akademik serta mendorong penataan *judicial review* di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Khususnya penataan Hukum Acara Pengujian Peraturan Perundang-undangan baik di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Demikianlah rekomendasi ini dibuat dan disampaikan dengan maksud dan tujuan untuk menata regulasi dan perbaikan ketatanegaraan di Indonesia.

**Jember, 12 November 2017**

Atas nama seluruh Peserta Konferensi Nasional Hukum Tata Negara  
(KNHTN) Ke – 4

Penyelenggara Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke - 4:

1. Prof. Dr. Moh. Mahfud, MD (Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara – Hukum Administrasi Negara (AP HTN-HAN)).
2. Dr. Bayu Dwi Anggono (Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember).
3. Feri Amsari, SH, LL.M (Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas)

**KEWENANGAN PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS KETETAPAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TERHADAP UUD NRI TAHUN  
1945<sup>274</sup>**

**Oleh:**

**Dr. I Gusti Bagus Suryawan, SH., M.Hum.<sup>275</sup>  
& Indah Permatasari, SH., MH.<sup>276</sup>**

**I. PENDAHULUAN**

Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga tinggi negara yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Utusan Daerah dan Utusan Golongan.<sup>277</sup> Sebelum perubahan UUD NRI 1945, problem lembaga negara terbatas pada kedudukan dan hubungan kekuasaan yang normanya secara tegas diatur dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/1978, yang membagi kedudukan lembaga negara atas dua kategori yaitu lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara.<sup>278</sup> Pasca dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan lembaga tertinggi negara berubah menjadi lembaga tinggi negara.

Munculnya ide untuk meniadakan atau mengubah kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara secara konseptual ingin menegaskan bahwa MPR bukan satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat.<sup>279</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat bukanlah pemegang kedaulatan rakyat lagi hal ini dikarenakan menurut Pasal 1 Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

---

<sup>274</sup> Makalah disampaikan dalam acara Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-4, dengan Tema “Penataan Regulasi di Indonesia”. pada tanggal 10-13 November 2017, di Jember Jawa Timur

<sup>275</sup> Penulis adalah Dosen di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

<sup>276</sup> Penulis adalah Dosen di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

<sup>277</sup> Reni Dwi Purnomowati, *Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 162.

<sup>278</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, (Malang: Setara Press, 2012), 166.

<sup>279</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis tentang Kelembagaan Negara*, (Jakarta: Permata Aksara, 2012), 64.

Undang Dasar. Setelah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi memiliki kewenangan untuk membuat produk hukum berupa ketetapan yang bersifat mengatur (*regeling*).<sup>280</sup>

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut Ketetapan MPR) adalah bentuk produk legislatif yang merupakan keputusan musyawarah Majelis Permusyawaratan Rakyat baik yang berlaku kedalam majelis sendiri maupun yang berlaku di luar majelis sendiri.<sup>281</sup> Meskipun setelah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ketetapan sebagai produk hukum yang bersifat mengatur, ada delapan Ketetapan MPR(S) yang hingga kini dinyatakan tetap berlaku. Ketetapan MPR diatas yang masih dinyatakan berlaku yang didasarkan atas Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2003.<sup>282</sup>

Munculnya Ketetapan MPR dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perancangan Peraturan Perundang-Undangan tentu saja berimplikasi pada sistem hukum di Indonesia. Kedudukan Ketetapan MPR sebagai bagian dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tentu saja menimbulkan perdebatan dan perbedaan pandangan di kalangan ahli hukum mengenai tepat atau tidaknya Ketetapan MPR berada di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, hal ini dikarenakan sebelumnya dalam UU No. 10 Tahun 2004 Ketetapan MPR tidak termasuk kedalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Adapun ketentuan pasal yang mengatur mengenai Ketetapan MPR dimasukkan kembali ke dalam hierarki Peraturan Perundang Undangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun isi ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut ialah :

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

---

<sup>280</sup>I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 610.

<sup>281</sup>Nomensen Sinamo, *op.cit*, h.19.

<sup>282</sup>I Dewa Gede Palguna, *op.cit*, h. 601.

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan pasal diatas menempatkan kedudukan Ketetapan MPR berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI Tahun 1945) dan berada di atas Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan pasal diatas kemudian muncul suatu permasalahan mengenai siapakah yang berwenang menguji Ketetapan MPR apabila dinilai bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945. Kekosongan norma hukum tersebut terlihat dari ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menentukan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 24 A ayat (1) dapat diketahui bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Berdasarkan kedua ketentuan pasal diatas dapat diketahui bahwa telah terjadi kekosongan norma hukum mengenai siapakah lembaga negara yang berwenang untuk menguji Ketetapan MPR apabila dinilai bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945. Permasalahan lainnya ialah setelah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi memiliki kewenangan untuk membuat produk hukum yang bersifat *regeling*, sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak memiliki kewenangan untuk mencabut Ketetapan MPR(S) yang hingga kini masih berlaku itu.<sup>283</sup>

Kokosongan norma hukum tersebut tentu saja dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat merugikan hak konstitusional warga negara yang merasa dirugikan dengan adanya Ketetapan MPR/MPRS yang masih berlaku tersebut. Salah satu permasalahan terkait dengan hal diatas ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai

<sup>283</sup>I Dewa Gede Palguna, *op.cit*, h.631.

dengan Tahun 2002, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam amar putusannya hakim menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan kedudukan Ketetapan MPRS/MPR ditetapkan secara hierarkis berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan di atas Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 pengujian terhadap Ketetapan MPRS/MPR tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dalam amar putusannya permohonan para Pemohon tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan amar putusan di atas dapat diketahui bahwa Ketetapan MPR tersebut tidak dapat diuji konstitusionalitasnya dihadapan Mahkamah Konstitusi. Hal ini menimbulkan suatu konsekuensi apabila Ketetapan MPR itu memuat ketentuan atau norma yang merugikan atau melanggar hak konstitusional warga negara maka kerugian atau pelanggaran itu akan permanen. Hal itu jelas bertentangan dengan gagasan negara hukum yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 1945.<sup>284</sup>

Penelitian ini sangat penting, mengingat manfaat yang sangat besar yang didapatkan, khususnya untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui lembaga manakah yang berwenang menguji Ketetapan MPR apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan dua permasalahan pokok yaitu :

1. Bagaimanakah kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hierarki peraturan perundang-undangan?
2. Lembaga Negara manakah yang berwenang menguji konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

## **II. PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan**

Pasca dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan lembaga tertinggi negara berubah menjadi lembaga tinggi negara. Kedudukan Majelis

---

<sup>284</sup>I Dewa Gede Palguna, *op.cit*, h.612.

Permusyawaratan Rakyat sejajar dan setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Munculnya ide untuk meniadakan atau mengubah kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara secara konseptual ingin menegaskan bahwa MPR bukan satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat.<sup>285</sup> Setelah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi memiliki kewenangan untuk membuat produk hukum berupa ketetapan yang bersifat mengatur (*regeling*).<sup>286</sup>

Dengan kewenangannya yang terbatas, Ketetapan MPR kemudian muncul dan dimasukkan kedalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai bagian dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Kedudukan Ketetapan MPR sebagai bagian dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentu saja menimbulkan perdebatan dan perbedaan pandangan di kalangan ahli hukum mengenai apakah tepat Ketetapan MPR berada di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 terdahulu Ketetapan MPR tidak tergolong ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat diketahui bahwa Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yaitu antara lain:

- a. materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multi tafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum;
- b. teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;
- c. terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
- d. penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.

Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat diketahui bahwa materi baru yang dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini ialah penambahan

<sup>285</sup>Nomensen Sinamo, *op.cit.*, 64.

<sup>286</sup>I Dewa Gede Palguna, *op.cit.*, 610.

Ketetapan MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada di bawah UUDNRI Tahun 1945.

Kedudukan Ketetapan MPR sebagai bagian dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memang menarik untuk dianalisis. Adapun isi ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut ialah :

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas dapat diketahui bahwa dari segi hierarki kedudukan Ketetapan MPR berada diatas undang-undang dan berada di bawah UUD NRI Tahun 1945. Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya Pasal 7 ayat (1) huruf b dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

Salah satu hakim konstitusi Maria Farida berpendapat bahwa kedudukan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan kurang tepat. Maria Farida menyatakan bahwa Ketetapan MPR tidak termasuk ke dalam jenis peraturan perundang undangan tetapi termasuk ke dalam *Staatsgrundgesetz*, sehingga menempatkannya ke dalam jenis peraturan perundang-undangan adalah sama dengan menempatkannya terlalu rendah.<sup>287</sup> Dalam draft naskah akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang didasarkan atas Surat

---

<sup>287</sup>Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007), 76.



Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: PHN.HN.01-03 Tahun 2016 dapat diketahui beberapa pandangan diantaranya adalah:

1. Pandangan yang menghendaki agar Ketetapan MPR tidak dimasukkan dalam bagian dari peraturan perundang-undangan mengingat ketetapan MPR merupakan *Staatsgrundgesetz* atau Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara. Seperti juga dengan UUD 1945, maka ketetapan MPR ini juga berisi garis-garis besar atau pokok-pokok kebijakan negara, sifat norma hukumnya masih secara garis besar, dan merupakan norma hukum tunggal dan tidak dilekati oleh norma hukum yang berisi sanksi. Batang tubuh UUD 1945 dan ketetapan MPR pada hakikatnya tidak dapat digolongkan kedalam peraturan perundang-undangan karena mengandung jenis norma yang lebih tinggi dan berbeda daripada norma yang terdapat dalam Undang-Undang. Para ahli menyebut norma semacam itu dengan *Staatsgrundgesetz*, yang diterjemahkan dengan Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara.
2. Pandangan yang menghendaki agar ketetapan MPR yang bersifat mengatur tidak perlu ada lagi sehingga tidak masuk dalam jenis peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagai mengingat: pertama, dilakukannya Perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 (1999-2002) membawa akibat yang cukup mendasar tentang kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintahan yang ada. Perubahan kedudukan, tugas dan wewenang MPR menurut UUD NRI Tahun 1945 mengakibatkan hilangnya kewenangan MPR untuk membentuk ketetapan-ketetapan MPR yang bersifat mengatur ke luar, seperti membuat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Perubahan kewenangan MPR dalam hal pembentukan ketetapan MPR yang berlaku ke luar membawa pula akibat perubahan pada kedudukan dan status hukum ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dalam tata susunan (hierarki) peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Kedua, semua aspek ketatanegaraan sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang pelaksanaannya, maka tampaknya Ketetapan MPR yang bersifat mengatur tidak lagi diperlukan karena sudah kehilangan urgensinya. Meskipun saat ini sesuai Pasal 2 TAP MPR Nomor: I/MPR/2003 terdapat 3 (tiga) ketetapan MPR/S yang dinyatakan masih berlaku dan sesuai Pasal 4 TAP MPR Nomor: I/MPR/2003 terdapat 11 (sebelas) Ketetapan MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang, namun karena MPR

sudah tidak berwenang lagi membentuk ketetapan MPR maka agar tidak menimbulkan kesan MPR berwenang membentuk Ketetapan MPR kembali sebaiknya Ketetapan MPR sudah tidak perlu disebut lagi sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Tidak disebutkan Ketetapan MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan tidaklah berarti mencabut keberlakuan Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR Nomor: I/MPR/2003.

3. Pandangan yang berpendapat sudah tepat memasukkan Ketetapan MPR sebagai jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur oleh Pasal 7 ayat (1) beserta penjelasannya hal ini demi menjamin kepastian hukum atas keberadaan Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR Nomor: I/MPR/2003. Prinsip kepastian dalam negara hukum ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1). Pasal 1 ayat (3): *Negara Indonesia adalah negara hukum*. Pasal 28D ayat (1): *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*. Ciri negara hukum adalah: (1). Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, (2) adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, (3) pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan, (4) adanya peradilan administrasi.<sup>288</sup>

Berdasarkan pandangan diatas penulis berpendapat bahwa perbedaan pandangan mengenai penempatan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan memang patut untuk dikaji. Hal yang penting untuk dikaji selanjutnya ialah apakah latar belakang dan manfaat dimasukkannya kembali Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan setelah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi memiliki kewenangan untuk membuat produk hukum berupa ketetapan yang bersifat mengatur (*regeling*).<sup>289</sup> Impikasi masuknya Ketetapan MPR kedalam hierarki peraturan perundang-undang berkaitan dengan kewenangan pengujian konstitusionalitas Ketetapan MPR juga menjadi permasalahan yang muncul akibat adanya kekosongan norma hukum. Sehingga penulis condong ke arah argumentasi yang berpandangan bahwa Ketetapan MPR tidak perlu dimasukkan ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

<sup>288</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: -)55-57

<sup>289</sup>I Dewa Gede Palguna, *op.cit.*,h.610.

## **2. Lembaga Negara yang Berwenang Menguji Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan ini diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 khususnya dalam ketentuan Pasal 24 C ayat (1) yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Apabila suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pemberian kewenangan pengujian ini diatur dalam ketentuan Pasal 24 A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Pertanyaan yang kemudian muncul dari kedua ketentuan pasal diatas ialah lembaga Negara manakah yang berwenang menguji Ketetapan MPR apabila bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Tidak dimilikinya kewenangan pengujian Ketetapan MPR apabila bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 tentu saja mengakibatkan tidak dapat diberikannya perlindungan hak konstitusional terhadap warga negara secara maksimal. Kekosongan norma hukum tersebut tentu saja dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat merugikan hak konstitusional warga negara yang merasa dirugikan dengan adanya Ketetapan MPR/MPRS yang masih berlaku tersebut. Permasalahan yang kemudian muncul ialah ketika adanya Ketetapan MPR yang dianggap merugikan hak konstitusional warga Negara sehingga menimbulkan pertanyaan lembaga Negara manakah yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas Ketetapan MPR tersebut. Salah satu permasalahan terkait dengan hal diatas ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam amar putusannya hakim menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan kedudukan Ketetapan MPRS/MPR ditetapkan secara hierarkis berada di bawah Undang-Undang

Dasar 1945 dan di atas Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 pengujian terhadap Ketetapan MPRS/MPR tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dalam amar putusannya permohonan para Pemohon tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini menimbulkan suatu konsekuensi apabila Ketetapan MPR/MPRS itu memuat ketentuan atau norma yang merugikan atau melanggar hak konstitusional warga negara maka kerugian atau pelanggaran itu akan permanen. Hal itu jelas bertentangan dengan gagasan negara hukum yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 1945.<sup>290</sup>

Menurut Daud Busro dan Abu Bakar Busro, Negara Hukum adalah Negara yang berdasarkan Hukum yang menjamin keadilan bagi warganya.<sup>291</sup> Penambahan kewenangan untuk menguji Ketetapan MPR terhadap UUD NRI Tahun 1945 tentu sejalan dengan konsep negara hukum. Hal ini dikarenakan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut J.F Sthal unsur-unsur Negara Hukum (*Rechtsstaat*) adalah:

1. Adanya pengakuan akan hak-hak dasar manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan (*wetmatigheid van bestuur*).
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara<sup>292</sup>

Salah satu unsur Negara Hukum (*Rechtsstaat*) menurut J.F Sthal ialah adanya pengakuan akan hak-hak dasar manusia. Konsekuensinya ialah Negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum wajib untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negaranya.

Salah satu lembaga negara yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara adalah Mahkamah Konstitusi. Pada hakikatnya, fungsi utama Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten (*the guardian of constitutions*) dan menafsirkan konstitusi atau UUD (*the interpreter of constitutions*).<sup>293</sup> Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi memiliki tugas imperatif untuk memastikan bahwa kekuasaan negara tidak sewenang-wenang, dan

<sup>290</sup>I Dewa Gede Palguna, *op.cit*, h.612.

<sup>291</sup> Hotma P.Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 48.

<sup>292</sup>Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 18.

<sup>293</sup>Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 221.

hak-hak rakyat dilindungi.<sup>294</sup> Pemaparan tersebut sejalan dengan konsep negara hukum dari Brian Tamanaha khususnya katagori ketiga mengenai mekanisme kontrol (lembaga-lembaga pengawal negara hukum) mengenai lembaga-lembaga lain yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan melindungi elemen-elemen negara hukum. Menurut Afiuka Hadjar dkk hal yang melatarbelakangi pembentukan Mahkamah Konstitusi, antara lain perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>295</sup>

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang bertugas mengawal pelaksanaan konstitusi sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi.<sup>296</sup> Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan tersendiri diluar Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya.<sup>297</sup> Dalam konteks pembentukan Mahkamah Konstitusi pada UUD 1945 perubahan ketiga, pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjaga dan memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme sebuah perundang-undangan, artinya Mahkamah Konstitusi sebagai sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan otoritas untuk menafsirkan konstitusi.<sup>298</sup> Dalam proses pembahasan rancangan undang-undang Mahkamah Konstitusi dapat diketahui bahwa ide pendirian Mahkamah Konstitusi ini sebagai salah satu ciri dari negara berkembang yang ingin menjadikan negaranya menjadi lebih demokratis serta pentingnya adanya badan peradilan yang bertugas untuk menyelesaikan masalah-masalah diseputar konstitusi suatu negara. Beberapa negara bahkan mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi.<sup>299</sup> Pada hakekatnya, fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten (*the guardian of constitutions*) dan menafsirkan konstitusi atau UUD (*the interpreter of constitutions*).<sup>300</sup> Dalam teori dan praktik mengenai Mahkamah Konstitusi di berbagai negara wewenang yang selalu melekat dalam tubuh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-

<sup>294</sup>Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya, *Hukum Etika & Kekuasaan*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 49.

<sup>295</sup>Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, ( Bandung: Alfabeta), 65.

<sup>296</sup>Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUDNRI Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 178.

<sup>297</sup>Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009) h.211.

<sup>298</sup>Nurudin Hadi, *Wewenang Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007), 28.

<sup>299</sup>Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012,), 7.

<sup>300</sup>Nomensen Sinamo, *op.cit.*, h.89.

undang dengan batu uji konstitusi.<sup>301</sup> Kewenangan menguji (*constitutional review*) yang dimiliki dan dilaksanakannya meliputi semua produk legislatif (*legislative acts*) yang merupakan perangkat hukum yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam setiap sistem politik di bawah Undang-Undang Dasar.<sup>302</sup>

Pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang mengatur bahwa pengujian undang-undang terhadap UUD dilatarbelakangi dengan adanya indikasi pelanggaran hak dan atau kewenangan konstitusional. Hak konstitusional merupakan hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 itu mencakup hak-hak yang tergolong ke dalam hak warga negara (*citizen right*) maupun hak-hak yang tergolong ke dalam hak asasi manusia (*human rights*).<sup>303</sup> Hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara tersebut tentu saja harus dilindungi dan dijamin oleh Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum.

Pemberian kewenangan pengujian Ketetapan MPR kepada Mahkamah Konstitusi merupakan suatu pemikiran yang logis. Hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin bahwa UUD NRI Tahun 1945 benar-benar terjelma dan ditaati dalam implementasinya, termasuk di dalamnya menjamin bahwa hak-hak konstitusional warga negara yang benar-benar dihormati, dilindungi, dan dipenuhi dalam praktik penyelenggaraan bernegara.<sup>304</sup> Penambahan kewenangan untuk mengadili atau memutus perkara pengujian Ketetapan MPR dapat dilakukan melalui penafsiran oleh hakim Mahkamah Konstitusi sendiri. Dalam konteks pembentukan Mahkamah Konstitusi pada UUD NRI Tahun 1945 perubahan ketiga, pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjaga dan memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme sebuah perundang-undangan, artinya Mahkamah

<sup>301</sup>Patrialis Akbar, *op.cit.*,h.178.

<sup>302</sup>Jimly Assiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) Selanjutnya disebut Jimly Assiddiqie I, 43.

<sup>303</sup>I Dewa Gede Palguna, *op.cit.*, h.39.

<sup>304</sup>Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2010, *Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)*, Jurnal Konstitusi Vol. 7 Nomor 1, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, h.41.

Konstitusi sebagai sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan otoritas untuk menafsirkan konstitusi.<sup>305</sup>

Penambahan kewenangan untuk untuk mengadili atau memutus perkara pengujian Ketetapan MPR dapat dilakukan dengan adanya permohonan pengujian Ketetapan MPR yang diajukan oleh pemohon yang hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya Ketetapan MPR tersebut melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap UUD. Pemohon dalam permohonannya harus menguraikan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu Ketetapan MPR. Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diuraikan tersebut harus bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Sehingga penambahan kewenangan mengadili Ketetapan MPR dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri dengan menyatakan dalam putusannya bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus pengujian Ketetapan MPR terhadap UU yang diajukan oleh hakim Mahkamah Agung maupun badan peradilan yang berada di bawahnya. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa penambahan kewenangan untuk menguji Ketetapan MPR dapat dilakukan melalui penafsiran hakim Mahkamah Konstitusi.

Selain melalui penafsiran hakim Mahkamah Konstitusi, penambahan kewenangan untuk menguji Ketetapan MPR terhadap UUD NRI Tahun 1945 dapat dilakukan melalui konvensi ketatanegaraan. Adanya konvensi ketatanegaraan adalah karena kebutuhan akan ketentuan-ketentuan untuk melengkapi rangka konstitusi.<sup>306</sup> K.C. Wheare menyatakan bahwa konvensi terbentuk melalui dua cara yakni konvensi yang terjadi karena kebiasaan (*custom*) dan konvensi yang terjadi melalui kesepakatan (*agreement*) yang memungkinkan adanya konvensi dalam bentuk tertulis.<sup>307</sup> Menurut K.C. Wheare, ada tiga cara untuk mengubah undang-undang dasar, yaitu *formal amendment* atau perubahan resmi, *constitutional convention* atau konvensi ketatanegaraan, dan *judicial interpretation* atau penafsiran pengadilan.<sup>308</sup> Dalam UUD NRI Tahun 1945 memang tidak diatur mengenai adanya kewenangan pengujian Ketetapan MPR yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga konvensi ketatanegaraan (*convention of the constitution*)

<sup>305</sup>Nurudin Hadi, *op.cit.*, h.28.

<sup>306</sup>Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), 37.

<sup>307</sup>Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: FH UII Press 2006),61.

<sup>308</sup>K.C. Wheare, *Modern Constitutions*, (London: Oxford University, 1960),121 dikutip dari Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 145.

dapat dimanfaatkan untuk ikut melengkapi tatanan di bidang ketatanegaraan untuk mengatasi kekurangan yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam hal kekosongan pengaturan mengenai kewenangan menguji Ketetapan MPR terhadap UUD NRI Tahun 1945.

### **III. PENTUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik dua simpulan antara lain sebagai berikut:

1. Ketetapan MPR dirasa tidak perlu dimasukkan ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terbatas dan tidak lagi memiliki kewenangan untuk membuat produk hukum berupa ketetapan yang bersifat mengatur (*regeling*) tidak lagi diperlukan karena sudah kehilangan urgensinya. Ketetapan MPR tidak termasuk ke dalam jenis peraturan perundang undangan tetapi termasuk ke dalam *Staatsgrundgesetz*, sehingga menempatkannya ke dalam jenis peraturan perundang-undangan adalah sama dengan menempatkannya terlalu rendah.
2. Penambahan kewenangan untuk mengadili atau memutus perkara pengujian Ketetapan MPR dapat dilakukan melalui penafsiran oleh hakim Mahkamah Konstitusi sendiri. Selain melalui penafsiran hakim Mahkamah Konstitusi, penambahan kewenangan untuk menguji Ketetapan MPR terhadap UUD NRI Tahun 1945 dapat dilakukan melalui konvensi ketatanegaraan.

#### **2. Saran**

1. Dari segi substansi hukum, kepada pembentuk undang-undang diharapkan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) mengenai kedudukan Ketetapan MPR di dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
2. Kepada penegak hukum diharapkan mampu mengoptimalkan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara melalui mekanisme pengujian Ketetapan MPR terhadap UUD NRI Tahun 1945.



## DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Patrialis, 2013, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUDNRI Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika.

Assiddiqie, Jimly, 2010, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika

Atmadja, I Dewa Gede, 2012, *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Malang: Setara Press.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2016, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta: -

Djamali, Abdoel, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Farida, Maria, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Yogyakarta: PT. Kanisius

Hadi, Nurudin, 2007, *Wewenang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

Nasution, Bahder Johan, 2011, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju.

Palguna, I Dewa Gede, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Prasetyo, Dossy Iskandar dan Bernard L. Tanya, 2011, *Hukum Etika & Kekuasaan*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Purnomowati, Reni Dwi, 2005, *Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Siahaan, Maruarar, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sibuea, Hotma P., 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga.

Sinamo, Nomensen, 2012, *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis tentang Kelembagaan Negara*, Jakarta: Permata Aksara.

Tutik, Titik Triwulan, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Media Group.

Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta

Suny, Ismail , 1981, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru

Manan, Bagir, 2006, *Konvensi Ketatanegaraan*, Yogyakarta: FH UII Press.

Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI.